

**TINJAUAN HISTORIS PEMERINTAHAN DINASTI MUGHAL PADA MASA
PEMERINTAHAN SULTAN AKBAR TAHUN 1556-1605 M**

Putri Dian Pertiwi¹, Elis Setiawati, M.Pd.²

^{1,2}Pendidikan Studi Sejarah FKIP Universitas Muhammadiyah Metro

Email: putridianpertiwi445@gmail.com

ABSTRACT

The presence of the Mughal Empire formed a new civilization in the area which at that time experienced a decline and backwardness. The Islamic Mughal Empire was able to raise the spirit of the Muslims in India. This shows that the Mughal Empire was not the first Islamic empire in India. The purpose of this study is to describe the background of Sultan Akbar's life, to describe the policies implemented by Sultan Akbar, and to describe the influence of the policies implemented by Sultan Akbar in India. This research approach is historical research. This research method uses the Historiography method. This research was conducted at the UM Metro library by reviewing the literature on the Mughal Dynasty during the reign of Sultan Akbar. The result of this research is that Sultan Akbar has a brave character and likes to play a role and also he has a tolerant soul, so that when he ruled in the Mughal kingdom he was famous for his tolerance. With the tolerant spirit that Sultan Akbar had, in ruling the Mughal empire he applied the Sulakhul (universal tolerance) policy. It deals with equal rights between Muslims and non-Muslims. Sultan Akbar in addition to implementing Sulakhul politics (universal tolerance), he also carried out various efforts in ruling in the Mughal kingdom including making Khana worship for the king's association with Muslim royal leaders in religious and government matters and making Din-i-Ilahi very controversy.

Keywords: *Government, Mughal Dynasty, Sultan Akbar*

PENDAHULUAN

Dinasti Mughal berhasil mempersembahkan perubahan besar dan menciptakan kemajuan-kemajuan di negara India. Pencapaiannya pun tidak hanya pada satu aspek saja melainkan berbagai aspek seperti politik, militer, ekonomi, sosial, budaya, agama, seni, dan ilmu pengetahuan. Pencapaian tersebut tidak terlepas dari peran para raja atau sultan yang menjalankan roda pemerintahan. Adapun pada pencapaian kejayaannya di dinasti Mughal salah satu sultan yang berkuasa dan dapat mencapai kejayaan yang luar biasa adalah sultan Akbar.

Sultan Akbar adalah keturunan dari sultan-sultan sebelumnya yang memerintah di kerajaan Mughal. Puncak kejayaan sultan Akbar dalam memerintah membuat dinasti mughal mendapatkan penghormatan dan penghargaan dari kerajaan-kerajaan lain tidak hanya kerajaan Islam saja melainkan kerajaan Hindu. Kebijakan-kebijakan yang dijalankan oleh Sultan Akbar membuat ia disegani oleh bangsa-bangsa lainnya.

Sultan Akbar adalah anak dari Sultan Hamayun dan merupakan cucu sultan Babur yakni raja pertama Dinasti Mughal. Ketika berumur 14 Tahun, Sultan

Akbar naik tahta menjadi raja, akan tetapi diusianya yang belia ia belum mampu menjalankan roda pemerintahan sehingga ia diwakilkan oleh Bairam Khan yang merupakan penasehat politik Dinasti Mughal pada saat itu. Kemudian pada 1556 saat Sultan Akbar berusia 17 Tahun Sultan Akbar mulai menjalankan roda pemerintahannya sendiri (Agustina, dkk., 2020: 125).

Sultan Akbar selama kepemimpinannya terkenal dengan kebijakan-kebijakan yang dapat mempersatukan rakyat baik yang beragama muslim maupun nonmuslim. Kebijakan-kebijakannya tersebut membawa dampak yang sangat besar terhadap kejayaan Dinasti Mughal. Adapun kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Sultan Akbar pada saat itu terlihat dari beberapa bidang diantaranya adalah pada bidang agama, Sultan Akbar mentolerir setiap agama yang berkembang di India dengan mengeluarkan UU Din Ilahhi, bahwasanya agama raja merupakan agama minoritas di India, jika tidak diterapkan toleransi dalam bidang agama akan menimbulkan sebuah diskriminasi agama yang mengakibatkan pengaruh kesenjangan terhadap bidang yang lain.

Di bidang budaya, bahwa pada masa sebelum Sultan Akbar, Dinasti Mughal tidak memiliki budaya asli sehingga budaya yang ada mengikuti budaya lingkungan sekitar. Namun pada masa pemerintahan Sultan Akbar, kebudayaan ditumbuh kembangkan berdasarkan akulturasi budaya dari Persia dan India. Hal itu dapat dilihat dari bangunan peninggalan Mughal seperti Farthepur Sikri, Red Fort, dan Masjid Jami'. Sultan Akbar juga menciptakan sebuah bahasa yang wajib digunakan oleh masyarakatnya yaitu bahasa Urdu. (Agustina, dkk., 2020: 126).

Berdasarkan uraian di atas bahwa kemenarikan dari Dinasti Mughal pada masa pemerintahan Sultan Akbar adalah karena dalam masa pemerintahannya, Sultan Akbar telah banyak menciptakan perubahan-perubahan baru yang ditujukan untuk mencapai kejayaan Dinasti Mughal. Perjuangan dalam pencapaian kejayaan yang dilakukan oleh Sultan Akbar sangat patut untuk diapresiasi karena untuk mencapai kejayaan dibutuhkan perjuangan keras sehingga dapat mencapai kejayaan tersebut. Usaha-usaha dalam memimpin Dinasti Mughal tidaklah mudah mengingat pada masa itu Agama Islam merupakan agama minoritas sehingga perlu untuk mengeluarkan Undang-undang agar tidak terjadi diskriminasi. Ide kreatif Sultan Akbar dalam membuat Undang-undang tersebut membuat Dinasti Mughal mulai menjadi perhatian oleh kerajaan lain sehingga membuat Sultan Akbar menjadi raja yang disegani bangsa lain.

METODE KAJIAN

Peneliti menggunakan kajian penelitian dengan menggunakan metode penelitian sejarah. Dalam melakukan penulisan laporan penelitian penulis melakukannya sesuai dengan prosedur dalam penelitian sejarah yakni memilih topik, mengumpulkan data, menguji keabsahan data, melakukan analisis data, dan historiografi atau melakukan penulisan. Secara rinci tahapan yang dilakukan diuraikan sebagai berikut:

1. Memilih topik

Topik yang dipilih oleh peneliti adalah pemerintahan Dinasti Mughal pada Masa Sultan Akbar yaitu terjadi pada tahun 1526-1605.

2. Mengumpulkan data

Data yang dikumpulkan peneliti adalah jurnal dan buku terkait dengan pemerintahan Dinasti Mughal terutama yang membahas mengenai kepemimpinan Sultan Akbar dan Kebijakan yang diterapkannya.

3. Menguji keabsahan data

Langkah pengujian keabsahan data yang digunakan peneliti adalah kritik ekstern dan intern sumber data.

4. Melakukan analisis data

Data yang diperoleh dari berbagai literatur kemudian di analisis dan dibuat kesimpulan setiap topik bahasannya.

5. Historiografi (Penulisan)

Setelah itu, peneliti melakukan penulisan laporan berdasarkan data yang diperoleh dan analisis data yang dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Biografi Sultan Akbar Latar

Sultan Akbar merupakan raja ketiga dari Dinasti Mughal setelah masa Raja Humayun berakhir. Sultan Akbar menjadi raja pada umur 14 Tahun. Berdasarkan riwayat kehidupannya, Sultan Akbar memiliki keluarga yang harmonis dan bahagia di lingkungan kerajaan. Ia memiliki beberapa orang Istri dan anak. sebagaimana hal ini diungkapkan oleh Rohman (2011: 14) yang menyatakan bahwa:

Sultan Jalaluddin Muhammad Akbar memiliki beberapa istri atau pasangan yakni Ruqaiya Sultan Begum, Salima Sultan Begum, dan Jodha Bai yang kelak dikenal dengan Mariam uz-Zamani. Mariam Uz-Zamani adalah gelar yang diberikan para penguasa kerajaan Mughal kepada istri raja yang telah melahirkan anak untuk menjadi pewaris tahta kerajaan Mughal. Gelar ini jatuh kepada salah satu istri atau pasangan Sultan Jalaluddin Muhammad

Akbar yakni Jodha Bai yang merupakan putri Rajput(kerajaan Hindu). Sultan Jalaluddin Muhammad Akbar memiliki anak dari Jodha Bai istrinya yakni Sultan Jahangir (Pangeran Salim) yang menjadi pewaris tahta dan raja setelah Sultan Jalaluddin Muhammad Akbar.

Dari pendapat di atas dapat digambarkan bahwa Sultan Akbar memiliki tiga orang Istri. Istri yang melahirkan dan mewarisi tahta memiliki gelar Mariam us-Zamani. Gelar ini ternyata jatuh pada seorang wanita yang bernama Joda Bai. Dari pernikahannya dengan Joda Bai, Sultan Akbar memiliki tiga orang anak yaitu Hussain Mirza, Hassan Mirza, dan Jahangir (pangeran Salim). Dari ketiga anaknya tersebut penerus Tahta kerajaan Mughal jatuh pada pangeran Jahangir (Salim). Selain menikahi Joda Bai (Mariam Uz-Zamani) dan menjadikannya salah satu permaisuri di Dinasti Mughal, Sultan Akbar juga memiliki dua orang istri yakni Ruqaiya Sultan Begum dan Salima Sultan Begum. Menurut Agustina (2020) bahwa:

Ruqqaiya Sultan Begum merupakan isteri dari Sultan Akbar yang merupakan anak dari Hindal Mirza yang tidak lain adalah adik Sultan Humayun. Pada bulan Novemberr 1551 M, mereka menikah dan pernikahannya diatur oleh Ayahnya. Namun dari pernikahan dengan Ruqayya, Sultan Akbar tidak dikaruniai anak.

Dari uraian di atas dapat diambil penjelasan bahwa Sultan Akbar juga memiliki isteri bernama Ruqayya Sultan Begum. Ruqayya Sultan Begum merupakan anak dari Hindal Mirza yang merupakan adik kandung Raja Humayun. Jadi Ruqayya Sultan Begum masih bersaudara dengan Sultan Akbar yakni adik sepupu. Dari pernikahannya dengan Ruqayya, Sultan Akbar tidak memiliki seorang putera maupun puteri. Kemudian, Sultan Akbar menikahi Janda bernama Salima Sultan Begum.

B. Kebijakan yang diterapkan oleh Sultan Akbar

1. Kebijakan dalam Bidang Politik Sultan Akbar Tahun 1556-1605

Pada masa awal pemerintahan Sultan Akbar di kerajaan Mughal pada mulanya mengalami kemerosotan, yang ditandai dengan krisis ekonomi yang membuat rakyatnya mengalami kelaparan. Di samping itu juga, kondisi kerajaan Mughal pada saat itu sedang tidak stabil, dimana terdapat banyak pemberontakan-pemberontakan terjadi yang menghiasi awal kepemimpinannya di kerajaan Mughal. Namun dengan kecakapan yang ia miliki, dapat menyelesaikan masalah itu dan dengan seiring berjalannya waktu maka ia membuat kerajaan Mughal mencapai masa kejayaan. Sebagaimana diungkapkan oleh Suwarno (2010: 91) bahwa:

Sultan Akbar memang seorang raja yang sangat cakap. Dia mengatur sistem politik dan administrasi dengan mengadopsi sistem yang sudah mapan (Arab dan Persia) yang disesuaikan dengan kondisi India. Sistem politik imperium Mughal disusun menurut pola kekhalifahan Dinasti Abbasiyah yang sebenarnya menganut pola Greco-Roman, yaitu *Coe Ropapisme* (Raja sebagai kepala negara sekaligus pemimpin agama).

Dari keterangan di atas dapat dipahami bahwa sistem politik yang diterapkan oleh Sultan Akbar ternyata mengadaptasi dari sistem politik dari Dinasti-dinasti yang sudah mencapai kejayaan seperti Dinasti yang ada di Persia dan Arab. Sistem politik yang dianut oleh Dinasti Mughal hampir sama dengan sistem politik Dinasti Abasiyah yakni mengikuti pola Greco Roman. Sultan Akbar menganggap dirinya sebagai raja sekaligus pemimpin agama, sehingga Sultan Akbar memiliki dua kedudukan yang sama tinggi.

2. Kebijakan dalam Bidang Sosial Sultan Akbar Tahun 1556-1605

Kebijakan dalam bidang sosial merupakan suatu kebijakan yang diterapkan dalam hubungannya dengan rakyat. Bagi suatu negara, Rakyat sangat dibutuhkan untuk memperkuat kedudukan dan wilayah. Oleh karena itu, seorang pemimpin atau raja harus mendapatkan banyak dukungan rakyat. Untuk mendapatkan dukungan penuh dari rakyat maka pemimpin atau raja harus menerapkan kebijakan yang menguntungkan banyak orang.

a. Politik Sullakhul (Toleransi Universal)

Dalam bidang sosial Sultan Akbar sangat menekankan toleransi dan persamaan hak antara manusia, maka dengan itu menerapkan *politik Sulakhul (toleransi universal)*, dimana ia menginginkan tidak ada perbedaan antara etnis dan agama di antara rakyatnya, mereka dipandang sama dan patut mendapat perlindungan dari kerajaan.

Menurut pendapat Nasution (2013: 50) bahwa dengan diterapkan *politik Sulakhul (toleransi universal)* adalah juga sebagai alat politik untuk memperkuat pemerintahan Sultan Akbar. Sultan Akbar memiliki istri yang merupakan seorang Hindu. Namun ia mempersilahkan istrinya itu untuk menjalankan ibadahnya dengan tenang, dan ia juga memberikan kebebasan kepada para wanita (istana) yang non-Muslim untuk menjalankan ibadahnya dengan tenang. Inilah salah bentuk betapa tolerannya Sultan Akbar.

Terkait dengan kutipan di atas dapat dijelaskan bahwa Sultan Akbar dalam menjalankan pemerintahannya, membuat kebijakan sosial untuk seluruh rakyatnya. Kebijakan sosial itu disebut dengan politik Sulakhul atau yang dikenal dengan istilah

toleransi universal. Kebijakan ini adalah memuat tentang berbagai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku bagi semua masyarakat. Politik Sulakhul terdiri dari toleransi beragama, toleransi dalam sosial, dan toleransi dalam ekonomi. Dalam bidang sosial keagamaan, Sultan Akbar memberikan kebebasan kepada semua warga untuk beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Hal ini dibuktikan dari toleransi Sultan Akbar kepada istrinya yang memeluk agama Hindu. Ia memberikan kebebasan kepada istrinya untuk beribadah di kuil. Tentu saja hal ini membuat rakyat senang dan tenang dalam beribadah maupun berhubungan sosial dengan orang lain walaupun berbeda kasta.

b. Isi Politik Sulakhul

Politik sulakhul yang diterapkan oleh Sultan Akbar memiliki dasar-dasar kebijakan untuk rakyat. Menurut Sophiah (2021: 3) bahwa isi reformasi yang tertuang dalam politik sulakkhul sebagai berikut:

- 1) Menghapus Jizyah bagi nonmuslim
- 2) Memberikan pelayanan pendidikan dan pengajaran yang sama bagi setiap masyarakat yakni dengan mendirikan madrasah-madrasah dan memberikan tanah wakaf bagi lembaga sufii
- 3) Membentuk undang-undang perkawinan baru yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, stabilitas, dan integrasi masyarakat muslim dan non muslim
- 4) Menghapus pajak-pajak pertanian terutama bagi petani miskin.
- 5) Menghapus tradisi perbudakan

Kutipan di atas menjelaskan bahwa ada lima isi dari kebijakan politik sulakhul yang diterapkan oleh Sultan Akbar yang untuk kepentingan rakyatnya. Pertama adalah menghapus jizyah. Jizyah merupakan suatu pajak yang dikenakan bagi kaum non muslim sebagai biaya perlindungan dan kebebasannya di suatu negara. Penghapusan Jizyah di India yang dilakukan oleh Sultan Akbar dilakukan sebagai penghormatan kepada kaum non muslim. Kedua, Sultan Akbar mendrikan banyak sekolah untuk kepentingan pendidikan Rakyatnya baik untuk muslim maupun non muslim. Artinya siapa saja yang ada di negara itu berhak untuk merasakan pendidikan baik di kalangan rakyat jelata maupun kaum bangsawan, semua orang diberikan hak yang sama. Ketiga yakni membentuk undang-undang perkawinan yang mengatur tentang kebebasan untuk menikah baik sesama muslim maupun campuran antara muslim dan non muslim. Keempat, Sultan Akbar menghapus pajak-pajak yang dianggap dapat meng sengsarakan rakyatnya. Bagi rakyat yang kurang mampu diperbolehkan untuk tidak membayar pajak pada Negara. Kelima

adalah menghapus perbudakan. Pada kebijakan ini Sultan Akbar menghapus sistem kasta yang ada pada rakyat sehingga tidak ada istilah budak di negara India pada masa itu.

3. Kebijakan dalam Bidang Agama dan Seni Sultan Akbar Tahun 1556-1605

a. Ibadat Khana

Usaha dalam aspek keagamaan ini menjadi kontroversi pada saat itu dan menuai pro dan kontra di antara rakyat kerajaan Mughal. Pada permulaan awal berdirinya kerajaan Mughal yang didirikan dan diperintah oleh Sultan Zahiruddin Muhammad Babur sampai dengan pertengahan pemerintahan Sultan Akbar, para ulama sebagaimana juga pada masa kesultanan Delhi sangat memegang peranan penting dalam pemerintahan terutama mengenai agama dan kemasyarakatan.

Sultan Akbar memiliki semangat keagamaan, sehingga ia mendirikan *Ibadat Khana* (tempat diskusi keagamaan) yang dibangun pada tahun 1575 di Fatehpur Sikri. *Ibadat Khana* ini merupakan rumah ibadat yang digunakan untuk diskusi agama antara kaum Muslim. Pada sidang pertama disana atau pertemuan pertama di *Ibadat Khana* para petinggi agama ini bertengkar mengenai tempat duduk, tapi itu dapat diatasi. Kemudian diantara mereka saling bertengkar tentang kecerdasan masing-masing, sehingga Sultan Akbar menjauhi mereka. Pertikaian itu mencapai klimaksnya pada tahun 1577 dimana Syekh Abdul Nabi menjatuhkan hukuman mati kepada seorang brahmana yang didakwa mengambil material pembangunan Masjid dan mencaci Nabi Muhammad saw. Sultan Akbar dan juga sebagian besar pejabat istana mengkritik vonis tersebut dan menganggapnya terlalu berat (Saputera, 2015)

Sultan Akbar tidak hanya disusahkan mengenai masalah diatas, tetapi saat itu kekuasaannya sangat terbatas. Sultan Jalaluddin Muhammad Akbar kemudian berdiskusi kepada Syekh Mubarak yang merupakan seorang ulama berpikiran bebas yang juga ayah dari Abu Fazl, yang sedang berdagang ke istana pada saat itu. Syekh Mubarak mengatakan bahwa menurut undang-undang Islam, jika ada pertikaian pendapat antara ahli hukum, maka kepala pemerintahan Islam mempunyai otoritas dan berhak memilih salah satu pendapat. Dari sinilah kemudian disusun sebuah dokumen yang menjelaskan bahwa Sultan Akbar mempunyai hak otoritas untuk memilih satu pendapat yang menguntungkan bangsa, jikalau terjadi perselisihan di antara rakyatnya. Dokumen ini menjadi cikal bakal kekuasaan Sultan Akbar terkait agama di kerajaan Mughal.

b. Din Illahi

Sebagai Raja sekaligus pemimpin Agama yang kuat, ia menerapkan pemahamannya tersebut dengan maksud untuk melakukan pembaharuan Agama dengan menyebutnya sebagai Din-i-Illahi. Akan tetapi penerapan pemahamannya itu telah menciptakan agama baru yang merupakan gabungan dari ajaran agama (Sinkretisme).

Din-i-Illahi ciri-ciri pentingnya adalah:

- 1) Percaya pada keesaan Tuhan;
 - 2) Akbar sebagai khalifah Tuhan dan seorang *padash* (*al-insan al-kamil*); ia mewakili Tuhan di muka bumi dan selalu mendapat bimbingan langsung dari Tuhan; ia *terma'shum* dari segala kesalahan;
 - 3) Semua pemimpin agama harus tunduk dan sujud pada Akbar;
 - 4) Sebagai manusia *padash*, ia berpantangan memakan daging (*vegetarian*);
 - 5) Menghormati api dan matahari sebagai simbol kehidupan;
 - 6) Hari ahad sebagai hari resmi ibadah;
 - 7) "Assalamualaikum" diganti "Allahu Akbar" dan "Alaikum salam" diganti "jalla jalalah."
- (Supardi, 2017)

Sehubungan dengan uraian di atas bahwa Din-illahi memiliki karakteristik mengandung nilai ketauhidan yakni mengesakan Tuhan. Kepercayaan ini kemudian dijadikan suatu politik bahwa raja adalah wakil Tuhan yang ada di Bumi sehingga rakyat harus percaya dan mematuhi apa yang diperintahkan oleh raja kepadanya. Din Illahi juga mengajarkan tentang adab dalam menyantap makanan, din illahi melarang untuk memakan daging dan cenderung vegetarian. Kepercayaan din illahi juga memuat tentang penyembahan matahari dan api sebagai sumber kehidupan di muka bumi. Selain itu, dalam Din Illahi juga mengajarkan tentang hari-hari suci dan penggantian sebagian ucapan salam.

4. Kebijakan dalam Bidang Ekonomi Sultan Akbar Tahun 1526-1605

Kebijakan lain yang diterapkan oleh Sultan Akbar dalam masa pemerintahannya juga merambah dalam bidang ekonomi. Perekonomian suatu kerajaan sangat penting untuk pembangunan dan kelangsungan hidup rakyat di kerajaan. Oleh sebab itu, Sultan Akbar juga memperhatikan keadaan ekonomi kerajaan Mughal dan menerapkan berbagai peraturan sehingga rakyat dapat sejahtera dan makmur. Kebijakan Ekonomi yang diterapkan oleh Sultan Akbar diantaranya adalah penghapusan pajak bagi rakyat miskin. Menurut Agustina (2020: 133) menjelaskan bahwa:

Sultan Akbar menerapkan sistem ekonomi pada sektor pertanian dan perdagangan, juga ditunjang dengan sistem penarikan pajak tanah dengan hasil bumi, pemberian hadiah dari masyarakat, barang yang dihasilkan dari ekspansi wilayah. Akbar adalah raja yang adil, maka dari itu sultan menghapuskan pajak yang dianggap memberatkan rakyat antara lain pajak jizyah (pajak beribadah) dan pajak petani miskin.

Sehubungan dengan pendapat di atas dapat digambarkan bahwa dalam bidang ekonomi, Sultan Akbar telah membentuk berbagai kebijakan yang sangat memihak kepada rakyat. Kebijakan-kebijakan dalam bidang ekonomi yang diterapkan antara lain adalah penarikan pajak hasil bumi, pemberian hadiah kepada rakyat, dan menghapus pajak tanah. Sultan Akbar memberikan kebijakan bagi petani untuk tidak memungut pajak atas hasil pertanian rakyat. Justru, Sultan Akbar memberikan hadiah bagi para rakyat yang berjasa untuk kerajaan. Hal ini juga diungkapkan oleh Suhaedi (2013: 182) yang menyatakan bahwa: "Kebijakan Sultan Akbar untuk rakyatnya dalam bidang sosial ekonomi adalah dengan menghapuskan pajak-pajak pertanian terutama bagi petani miskin baik petani muslim maupun non muslim". Pendapat tersebut menjelaskan bahwa Sultan Akbar menegaskan kebebasan untuk rakyat untuk tidak memberikan pajak kepada kerajaan. Kebijakan ekonomi dalam hal pajak ini diberlakukan bagi petani baik petani yang menganut agama islam maupun non islam.

5. Kebijakan dalam Perluasan Wilayah Sultan Akbar Tahun 1556-1605

Seperti raja-raja lainnya yang memerintah sebuah kerajaan, dimana mereka akan berusaha memperluas wilayah kekuasaan kerajaannya, sama seperti Sultan Akbar selama ia memerintah di kerajaan Mughal, ia sangat gencar melakukan serangan-serangan ke wilayah-wilayah untuk memperluas daerah kekuasaannya.

Di sebelah utara, Sultan Akbar dapat menguasai Kashmir pada tahun 1586, selanjutnya menaklukkan Shind yang berada di sebelah barat laut Delhi pada tahun 1590, dan Orissa di sebelah timur Sultan Akbar dapat menguasainya pada tahun 1592. Sultan Akbar juga dapat menguasai beberapa wilayah-wilayah lain seperti Kerajaan Deccan pada tahun 1596, Namala pada tahun 1598, Ahmadnagar pada tahun 1600 dan Asitgah pada tahun 1601 (Agustina, 2020)

Dalam keterangan di atas bahwa Sultan Akbar melakukan penyerang-penyerangan ke daerah-daerah yang dimulai pada tahun 1561 dengan penaklukan daerah Malwa sampai pada tahun 1601 yang ditandai dengan

dikuasainya daerah Asitgah. Dalam menaklukkan Gujarat pada tahun 1572, pasukan kerajaan Mughal dipimpin sendiri oleh Sultan Akbar. Pada tahun 1573 daerah Surat dapat dikuasainya setelah ia mengepung Surat selama satu setengah bulan. Tahun 1574 Sultan Akbar memimpin pasukannya untuk menyerbu Bengala, yang pemimpinnya bernama Daud menentang Sultan Akbar dan mengusir penguasa Bengala dari Patna dan Hajipur.

C. Pengaruh Kebijakan Yang Diterapkan Sultan Akbar

1. Bidang Politik Sultan Akbar Tahun 1556-1605

Kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh Sultan Akbar membawa dampak bagi kehidupan masyarakat di India pada masa itu. Kebijakan dalam bidang politik pada masa kepemimpinan Sultan Akbar bertujuan agar Dinasti Mughal dapat mencapai kejayaan dan dapat memperluas daerahnya. Kebijakan dalam bidang politik, berdampak pada:

- a. India Sebagai Negara Merdeka
- b. Pembagian Wilayah Kerajaan
- c. Dukungan dari Rakyat

2. Pengaruh Bidang Sosial Sultan Akbar Tahun 1556-1605

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa Sultan Akbar menerapkan kebijakan politik Sulakhul. Dampak dari kebijakan Sulakhul pada bidang Sosial Sultan Akbar adalah:

- a. Penghapusan Sistem Kasta di India

Politik toleransi yang diterapkan oleh Sultan Akbar jelas menghapuskan sistem kasta yang ada di India. Sultan Akbar tidak menghendaki adanya kasta-kasta di lingkungan kerajaan. Beliau memandang bahwa semua rakyat mempunyai hak yang sama dalam kehidupan.

- b. Kesetaraan Gender dan Persamaan Hak

Dampaknya adalah terjadinya transformasi sosial karena kesetaraan penduduk dalam memperoleh akses ekonomi dan untuk bagian tertentu adalah menjadi pegawai pemerintah dan tentara. Perubahan menonjol lainnya adalah masalah kesetaraan gender. Keberadaan kaum wanita yang selama ratusan tahun menjadi kelompok kelas dua terangkat oleh masuknya Islam di India.

Upacara Sati (menceburkan diri ke api seorang perempuan dalam pembakaran mayat suaminya) terus terkikis oleh pengaruh Islam di India.

3. Pengaruh Bidang Agama dan Seni Sultan Akbar Tahun 1556-1605

a. Karya Sastra

Sultan Akbar menghasilkan banyak karya-karya yang termashur di India diantaranya adalah paham Din Illahi yang menghasilkan agama Sikh dan Bahasa Urdu yang kemudian dijadikan bahasa di India.

1). Bangunan

Sultan Akbar membangun Masjid Jami' yang kemudian direnovasi pada masa pemerintahan Jahangir dan diberi nama Taj Mahal. Kemudian ada Fathepur Sirki yang merupakan kantor distrik, dan Red Fort yang merupakan benteng kerajaan. Selain itu terdapat Turbah. Turbah Raja Akbar yakni merupakan makam Sultan Jalaluddin Muhammad Akbar yang terletak di Iskandariah dekat kota Agra.

2). Perkembangan Kepercayaan dan Aliran Keagamaan

Masuknya Islam di India bukan tidak menimbulkan masalah konflik kepercayaan. Hal ini sangat wajar mengingat di wilayah tersebut berkembang dua agama besar terutama Hindu dan Islam.

4. Pengaruh dalam Bidang Ekonomi Sultan Akbar Tahun 1556-1605

Kebijakan dalam bidang ekonomi yang diterapkan oleh Sultan Akbar memberikan dampak pada pertumbuhan dan perkembangan perekonomian rakyat. Kebijakan ekonomi dalam penghapusan pajak memberikan dampak pada kesejahteraan rakyat itu sendiri. Sebab, rakyat tidak perlu membayarkan pajak kepada Kerajaan sehingga rakyat dapat menikmati hasil panen yang mereka miliki. Selain itu, kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh sultan akbar juga berdampak pada menurunnya tingkat korupsi yang dilakukan oleh kaum bangsawan. Mereka yang melakukan korupsi akan mendapatkan hukuman. Dengan demikian, terciptalah kestabilan ekonomi di wilayah India.

5. Pengaruh Bidang Perluasan Wilayah Sultan Akbar Tahun 1556-1605

. Wilayah yang luas dapat memberikan keuntungan pada sistem militer. Di masa Sultan Akbar Kerajaan yang luas ini, terbagi dalam Suba (provinsi). Masing-masing di bawah seorang subadar sebagai wakil raja, mereka diambil dari

keluarga raja. Dibawah Suba, ialah Sarkar (district) yang dikepalai oleh seorang mansabdar. Kepala pengadilan mengelola sistem peradilan, sabadr yang lebih rendah menangani pertahanan lokal dan urusan registrasi, sedangkan qadi menangani perkara perdata dan pidana. Juru dakwah dan imam shalat juga diangkat dan di gaji oleh negara. Jadi, jabatan-jabatan pemerintahan pada masa Sultan Akbar lebih teratur. Meskipun dalam pemerintahan Kerajaan Mughal banyak diwarnai dengan perebutan kekuasaan, namun secara keseluruhan pemerintahannya masih dapat terkendali, terutama pada masa Sultan Akbar. Hal itu disebabkan karena ia menyusun pemerintahan dengan teratur dan menerapkan sistem militeristik dalam rangka mempertahankan wilayahnya.

PENUTUP

Kesimpulan

Sultan Akbar memiliki karakter yang pemberani dan suka berperan dan juga ia memiliki jiwa yang toleran, sehingga disaat ia memerintah di kerajaan Mughal terkenal dengan toleransinya. Dengan jiwa toleran yang Sultan Akbar miliki, maka di dalam memerintah di kerajaan Mughal ia menerapkan *politik Sulakhul (toleransi universal)*. Yang berkaitan dengan persamaan hak antara rakyat Muslim dengan non-Muslim. Sultan Akbar disamping menerapkan *politik Sulakhul (toleransi universal)*, ia juga menjalankan berbagai usaha dalam memerintah di kerajaan Mughal diantaranya adalah membuat Ibadat Khana untuk perkumpulan raja dengan para pemuka kerajaan yang beragama Islam dalam masalah agama dan pemerintahan dan membuat Din-i-Ilahi yang sangat kontroversi.

Saran

Hasil penelitian ini bahwa kebijakan yang diterapkan oleh Sultan Akbar sangat mendukung rakyatnya sehingga ia dapat memperoleh kejayaan pada masa pemerintahan Mughal. Sebagai implikasi dari penelitian ini penelitian ini harus dikaji lagi agar menambah pengetahuan kita terkait sejarah Islam di abad pertengahan khususnya kerajaan Mughal di India.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Sari., Sumarjono., Sumarno., dan Ahmad Ryan Pratama. 2020. Jalaludin Myhammad Akbar's Policy in India 1556-1605. *Jurnal Historica*. 4(1), h. 124-137.
- Muhammad, Jamaludin Miri. 2019. Kemunduran Kerajaan Mughal. *Jurnal el-Harakah*. 11(3), h. 216-225.
- Nasution, Syamruddin. 2013. *Sejarah Peradaban Islam*. Pekanbaru: Yayasan Pusaka Riau.
- Rohman, Sandi Nur. *Dinasti Mughal: Menelusuri Jejak Peradaban Islam di Tanah Hindustan*. Jakarta: Diandra Kreatif.
- Saputera, Anugerah. 2015. Kerajaan Mughal Pada Masa Pemerintahan Sultan Akbar. *Jurnal Sejarah*. 1(2), h. 1-19.
- Sophiah. 2021. Politik Sulakhul dalam Pemerintahan Mughal. *Jurnal Historia*. 2(1), h. 47-60.
- Suhaedi. 2013. Kesultanan Mughal di India. *Jurnal Tsaqofah*. 11(2), h. 170-204.
- Supardi. 2019. Perkembangan dan Peninggalan Dinasti Mughol di India 1525-1857. *Jurnal Pendidikan Sejarah*. 1(3) h, 1-19.
- Suwarno. 2010. *Dinamika Sejarah Asia Selatan*. Yogyakarta: Ombak.